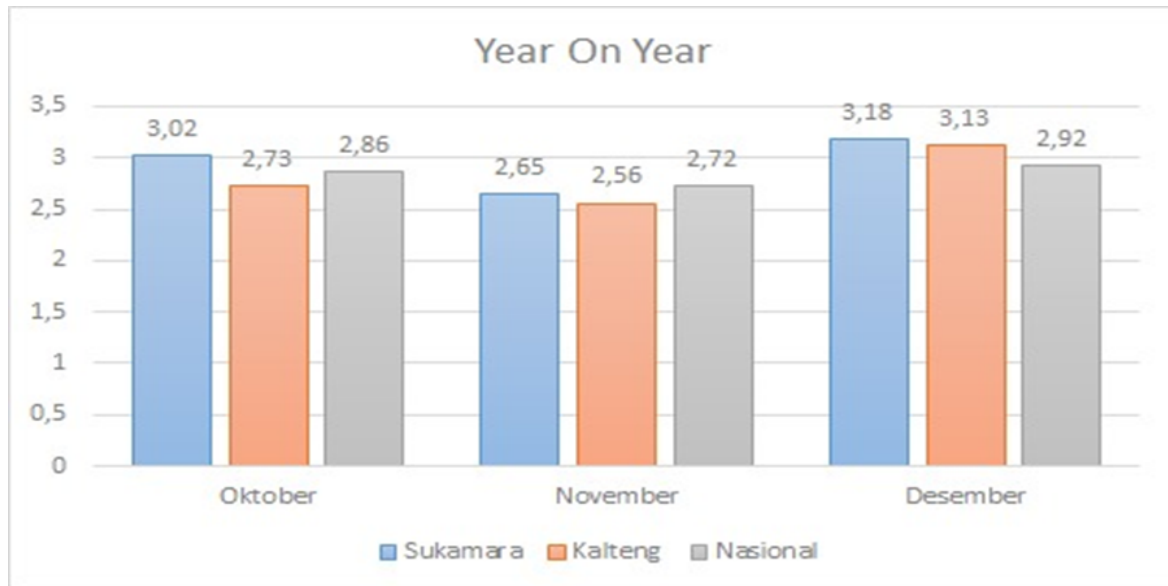
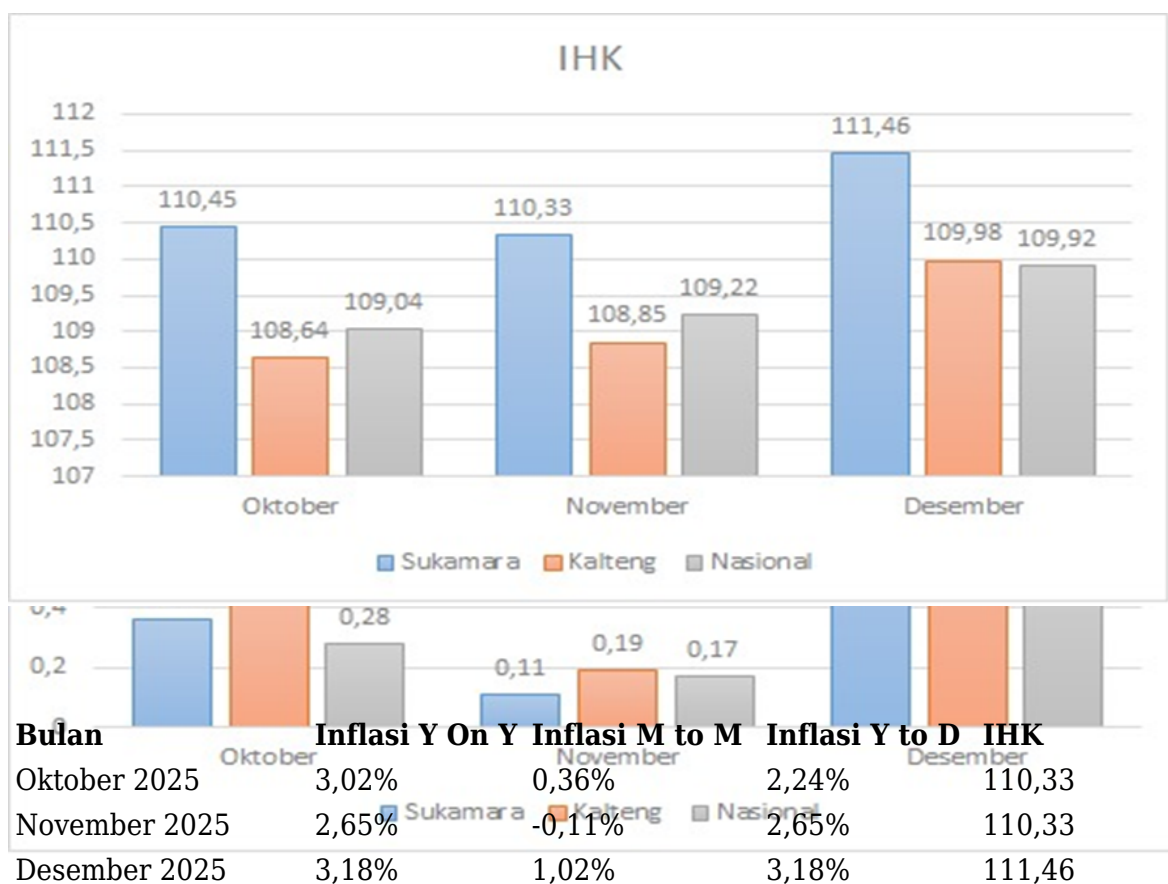


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Sukamara Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :





Secara umum, inflasi tahunan (Year-On-Year) di Kabupaten Sukamara selama Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada akhir tahun. Inflasi Y-on-Y tercatat sebesar 3,02 % pada Oktober 2025, kemudian menurun menjadi 2,65 % pada November 2025, dan kembali meningkat menjadi 3,18 % pada Desember 2025. Peningkatan inflasi pada akhir triwulan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru serta kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran utama.

Faktor Penyumbang Inflasi di Kabupaten Sukamara pada Triwulan IV 2025 dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran sebagai berikut :

Makanan, Minuman, dan Tembakau Kelompok ini menjadi penyumbang utama inflasi

1. sepanjang Triwulan IV 2025. Inflasi y-on-y kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat meningkat hingga 4,45 % pada Desember 2025 dengan andil inflasi sebesar 2,02 %. Komoditas dominan penyumbang inflasi antara lain bawang merah, kopi bubuk, sigaret kretek mesin (SKM), sigaret kretek tangan (SKT), minyak goreng, beras, ikan segar, dan air kemasan.
2. Pakaian dan Alas Kaki Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi y-on-y sebesar 5,19 % secara konsisten hingga akhir tahun 2025, dengan andil inflasi sekitar 0,21 %. Kenaikan harga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pakaian dan alas kaki menjelang akhir tahun.
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga Kelompok ini mencatat inflasi y-on-y sebesar 1,22 % pada Desember 2025 dengan andil inflasi 0,17 %. Kenaikan harga terutama disumbang oleh komoditas sewa rumah dan tarif air minum PAM.
4. Transportasi Kelompok transportasi mengalami inflasi y-on-y sebesar 1,35 % pada Desember 2025 dengan andil inflasi 0,13 %. Tekanan inflasi terutama berasal dari meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru.
5. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi y-on-y cukup tinggi sebesar 9,24 % pada Desember 2025, dengan andil inflasi sebesar 0,49 %. Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan dan produk perawatan pribadi.

Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi atau penurunan indeks harga antara lain:

1. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,56 %.
2. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,18 %.

Komoditas dominan penyumbang inflasi y-on-y selama Triwulan IV 2025 antara lain bawang merah, kopi bubuk, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, minyak goreng, beras, sewa rumah, tarif air PAM, serta beberapa komoditas ikan segar. Sementara itu, komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain daging ayam ras, beberapa jenis ikan, sabun detergen, dan perangkat komunikasi.

Tekanan inflasi pada Triwulan IV 2025 terutama bersumber dari sisi permintaan (demand-pull) menjelang akhir tahun serta faktor sisi pasokan (cost-push) akibat fluktuasi harga pangan dan biaya distribusi. Secara keseluruhan, inflasi Kabupaten Sukamara pada Triwulan IV Tahun 2025 masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional dan mencerminkan stabilitas harga yang relatif terjaga.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dari hasil evaluasi TPID Kabupaten Sukamara faktor penyebabnya antara lain sebagai berikut :

1. Fluktuasi Harga Bahan Pangan Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi. Harga komoditas pangan strategis seperti bawang merah, cabai, minyak goreng, dan beras sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, distribusi, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Peningkatan Permintaan Musiman, meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Natal

2.

dan Tahun Baru mendorong kenaikan harga pada kelompok makanan, pakaian, transportasi, serta jasa makanan dan minuman.

3. Keterbatasan Sarana Penyimpanan Pangan dimana belum tersedianya sarana penyimpanan (cold storage) menyebabkan pasokan pangan mudah terganggu dan harga berfluktuasi ketika terjadi penurunan pasokan.

4. Kenaikan Harga Komoditas Non Pangan, kenaikan harga emas perhiasan dan produk perawatan pribadi mendorong inflasi inti dan meningkatkan ekspektasi inflasi masyarakat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Sukamara, TPID melalui dinas teknis selain melakukan pemantauan harga komoditas penyumbang inflasi juga melakukan beberapa langkah strategis sebagai upaya pengendalian. Dengan menyusun program kerja yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukamara dan Dana Insentif Fiskal, TPID Kabupaten Sukamara melakukan beberapa kegiatan sebagai pelaksanaan kebijakan dalam hal penanganan inflasi daerah di Kabupaten Sukamara. Kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengikuti Rakornas Mingguan Pengendalian Inflasi Secara Online yang dilaksanakan setiap minggu.
2. Melaksanakan rapat teknis TPID untuk menyusun rencana program kegiatan dan pelaksanaan pengendalian inflasi pada saat terjadi lonjakan harga.
3. Melaksanakan Sidak Pasar secara berkala untuk memantau harga komoditas pada saat terjadi lonjakan harga yang signifikan atau memantau stok persediaan komoditas pada saat menjelang hari besar keagamaan nasional.
4. Program KURDA Sukma

Dalam upaya memperkuat permodalan pelaku UMKM, Pemerintah Kabupaten Sukamara memberikan bantuan berupa subsidi suku bunga bagi para pedagang UMKM sejak tahun 2023. Bekerjasama dengan PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) yang merupakan salah satu BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sukamara penyaluran kredit KURDA SUKMA diharapkan mampu memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dengan suku bunga 12% pertahun, Pemerintah Kabupaten Sukamara mensubsidi sebesar 9% sehingga suku bunga yang di bebaskan ke nasabah UMKM hanya sebesar 3%. Tahun 2025, hingga saat ini PT. BPR Artha Sukma (Perseroda) sudah menyalurkan kredit sebesar Rp. 5.893.800.000 dengan baki debet sebesar Rp. 2.154.795.000 dan biaya yang sudah di anggarkan untuk subsidi oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara sebesar Rp. 400.000.000 kepada 188 nasabah UMKM (115 debitur exsisting dan 73 debitur lunas).

5. Gerakan Peternak Sadar Inflasi

Daging ayam ras merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi paling dominan, terutama pada saat menjelang hari besar keagamaan atau event besar nasional dan kabupaten. Adanya pengurangan jatah bibit ayam ras untuk perusahaan - perusahaan yang jadi pemasok peternakan di Kabupaten Sukamara membuat harga daging ayam ras menjadi melonjak tajam.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui TPID melakukan rapat

koordinasi secara intens dengan pelaku peternakan dan pedagang ayam ras dalam mengatur pola panen di kandang untuk menjaga kestabilan ketersediaan ayam ras, meminta penjualan daging ayam ras mengutamakan pemenuhan kebutuhan pasokan di pasar – pasar di Kabupaten Sukamara, dan mengedukasi pelaku usaha peternakan ayam ras untuk peduli dengan inflasi yang akan berpengaruh secara massif untuk kegiatan usaha lainnya.

Kegiatan ini berpengaruh signifikan terhadap harga jual daging ayam ras di pasar, terbukti harga ayam ras bisa stabil meskipun menjelang hari besar keagamaan atau event besar. Harga daging ayam ras berkisar Rp. 30.000 – Rp. 40.000/kg yang awalnya bisa mencapai harga Rp. 45.000 – Rp. 50.000/kg.

6. Kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL)

Kegiatan promosi penganeekaragaman pangan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat, pada kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) ini dilakukan juga pembibitan komoditas hortikultura seperti cabe, terong , tomat untuk dibagikan kepada Organisasi perangkat daerah untuk ditanam di pekarangan kantor. Kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) ini juga di promosikan pada kegiatan Car Free Day dengan membagikan bibit tersebut untuk ditanam dipekarangan rumah. Kegiatan ini bertujuan :

1. Pemanfaatan lahan perkantoran untuk penyediaan pangan dan gizi.
2. Sebagai sarana percontohan untuk masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi.
3. Sebagai upaya promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat.
4. Pasar Penyeimbang Melalui Kios Pangan Sukma

Salah satu upaya untuk menstabilkan harga pangan strategis Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan bekerjasama dengan Bulog membuka Kios Pangan Sukma. Kios Pangan Sukma menjual komoditas utama seperti beras, gula, minyak kita, telur, bawang merah dan bawang putih dengan harga lebih terjangkau dari pasar.

8. Gerakan Pangan Murah

Sebagai upaya menstabilkan harga pangan strategis terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru maka Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang bekerjasama dengan Bulog melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah pada tanggal 16 Oktober 2025 bertempat di Pasar Inpres Sukamara. Adapun bahan pokok yang di salurkan seperti Beras, Gula, Telur Ayam Ras, Minyak Goreng, Bawang Merah dan Bawang Putih.

9. Operasi Pasar LPG 3 Kg

Dalam upaya mengatasi kelangkaan gas LPG 3 Kg karena tingginya permintaan maka Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melaksanakan operasi pasar gas LPG 3 KG bertempat di Pasar Inpres Sukamara pada tanggal 16 Oktober 2025.

10. Pemberian Bantuan Subsidi BBM

Nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat terdampak oleh fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM nonsubsidi berdampak langsung terhadap biaya operasional penangkapan ikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harga ikan di pasaran. Kondisi ini berpotensi menjadi salah satu faktor pendorong inflasi, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya komoditas ikan segar. Untuk menjaga kestabilan harga pangan dan mendukung daya beli masyarakat, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat melaksanakan program bantuan BBM bersubsidi bagi nelayan sebagai salah satu langkah strategis pengendalian inflasi daerah.

Sasaran program ini adalah Nelayan kecil dengan kapasitas kapal di bawah 30 GT, terdaftar dalam database KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan), dan juga nelayan di Wilayah pesisir atau sentra perikanan. Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas Perikanan memberikan Bantuan Subsidi BBM kepada 611 nelayan dengan kuota 34,25 liter perbulan selama 4 bulan, keseluruhan anggaran yang di alokasikan pada triwulan IV sebesar Rp. 676.859.166,-.

Program bantuan BBM bersubsidi bagi nelayan merupakan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan sosial, tetapi juga menjadi instrumen efektif pengendalian inflasi daerah. Dengan memastikan nelayan tetap produktif dan harga ikan tetap stabil, maka keseimbangan antara produksi, pasokan, dan harga pangan dapat terjaga sebagai upaya mendukung kestabilan ekonomi daerah secara keseluruhan.

11. Bantuan Sarana Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu penyedia utama bahan pangan protein hewani bagi masyarakat dan memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas harga pangan. Namun, nelayan kecil dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan masih menghadapi kendala dalam produktivitas dan efisiensi usaha, terutama akibat keterbatasan sarana tangkap dan alat pengolahan. Kondisi tersebut menyebabkan produksi ikan tidak optimal, terutama di musim paceklik, sehingga pasokan menurun dan harga ikan di pasar meningkat. Kenaikan harga ikan segar maupun olahan berpotensi mendorong inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Sebagai respon terhadap hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas Perikanan melaksanakan program pemberian bantuan peralatan perikanan tangkap dan pengolahan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi dari sisi pasokan (supply side), sekaligus mendorong kemandirian ekonomi nelayan. Sampai dengan bulan Desember 2025 sudah disalurkan bantuan berupa peralatan pengolahan peralatan tangkap kepada 12 Poklamsar, 10 KUB dan 2 Pokdakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.816.392.770,.

Program pemberian bantuan peralatan perikanan tangkap dan pengolahan merupakan langkah strategis dalam pengendalian inflasi berbasis produksi dan pasokan. Melalui peningkatan produktivitas tangkap dan diversifikasi produk olahan, daerah dapat menjaga ketersediaan pangan, menstabilkan harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini sejalan dengan kebijakan nasional pengendalian inflasi pangan, serta mendukung pencapaian sasaran inflasi daerah yang rendah, stabil, dan terkendali.

12. Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Peternakan

Kebijakan pengendalian inflasi daerah juga diperkuat melalui penyaluran bantuan sarana

produksi pertanian dan peternakan yang diarahkan untuk memperkuat sisi pasokan (supply side) pangan strategis. Bantuan tersebut meliputi penyediaan benih padi dan jagung, serta ternak unggas yang disalurkan kepada kelompok tani dan kelompok wanita tani di beberapa wilayah sentra produksi. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas produksi pangan lokal, menjaga kesinambungan pasokan sepanjang tahun, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Dengan meningkatnya ketersediaan pangan di tingkat lokal, kebijakan ini diharapkan mampu memitigasi risiko volatilitas harga dan potensi kenaikan harga akibat gangguan pasokan, baik yang bersifat musiman maupun struktural.

Selanjutnya, upaya pengendalian inflasi juga didukung oleh kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di lima kecamatan. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas petani dalam penerapan praktik budidaya yang baik (good agricultural practices), efisiensi penggunaan sarana produksi, serta pengelolaan usaha tani yang lebih produktif dan berkelanjutan. Pendampingan tersebut turut berperan dalam meningkatkan hasil panen, menekan biaya produksi, dan memperbaiki kualitas komoditas pertanian, sehingga secara struktural berkontribusi terhadap peningkatan stabilitas pasokan dan pengendalian inflasi pangan di Kabupaten Sukamara dalam jangka menengah hingga panjang.

13. Kegiatan Pasar Murah

Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perdagangan melaksanakan Kegiatan Pasar Murah sebagai bentuk intervensi terhadap lonjakan harga bahan pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Kegiatan tersebut menyediakan kebutuhan pokok seperti Beras Premium 5 Kg, Minyak Goreng 2 Liter dan Gula 1 Kg dengan harga yang disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara. Kegiatan Pasar Murah dilaksanakan bekerjasama dengan Perum Bulog selaku penyedia sesuai dengan DPPA Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukamara Nomor : DPPA/A.3/2.17.3.30.3.31.19.0000/001/2025 dengan Kode Rekening 5.1.04.01.01.0001 Belanja Subsidi kepada BUMN. Paket Pasar Murah yang tersedia sebanyak 1.886 Paket yang dialokasikan di 4 (empat) Kecamatan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan perkembangan inflasi Kabupaten Sukamara Triwulan IV Tahun 2025 yang menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada akhir tahun, kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh TPID Kabupaten Sukamara secara umum telah berjalan cukup efektif dalam menjaga inflasi tetap berada dalam rentang sasaran nasional. Berbagai intervensi kebijakan, khususnya pada komoditas pangan strategis dan pengendalian lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) mampu meredam tekanan inflasi yang bersumber dari sisi permintaan maupun pasokan.

Pelaksanaan kegiatan seperti pemantauan harga secara berkala, sidak pasar, gerakan pangan murah, operasi pasar LPG, penguatan sektor produksi melalui bantuan peralatan perikanan, serta subsidi BBM bagi nelayan terbukti berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas utama. Program inovatif seperti Gerakan Peternak Sadar Inflasi, Kios Pangan Sukma, dan KURDA Sukma juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok pangan dan UMKM.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengendalian inflasi masih menghadapi beberapa tantangan. Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah menyebabkan harga komoditas tertentu, seperti bawang merah, cabai, dan beras, masih rentan terhadap gangguan distribusi dan faktor cuaca. Selain itu, keterbatasan sarana penyimpanan pangan dan belum optimalnya sistem data harga dan stok secara real time menyebabkan respons kebijakan belum sepenuhnya cepat dan terukur.

Koordinasi lintas perangkat daerah dalam kerangka TPID telah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal pemanfaatan data inflasi sebagai dasar penentuan waktu, lokasi, dan jenis intervensi kebijakan. Ke depan, penguatan kebijakan berbasis data, perluasan jangkauan program intervensi, serta peningkatan peran sektor produksi lokal menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan inflasi periode Juli –September 2025, berikut rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan TPID Kabupaten Sukamara untuk menjaga stabilitas harga:

1. Ketersediaan Pasokan (Availability)

1. Memperkuat produksi pangan lokal melalui perluasan program hortikultura, peternakan rakyat, dan perikanan budidaya guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
2. Mengembangkan cadangan pangan daerah dan buffer stock komoditas strategis (beras, cabai, bawang merah) sebagai langkah antisipatif terhadap gangguan pasokan dan lonjakan harga musiman.
3. Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur, dan lahan eks terbakar untuk komoditas cepat panen melalui pendampingan teknis yang berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan program OPAL dan program berbasis rumah tangga sebagai instrumen jangka menengah pengendalian inflasi pangan.

2. Keterjangkauan Harga (Affordability)

1. Menjadwalkan kegiatan pasar murah dan gerakan pangan murah secara lebih terencana dan tematik (per triwulan) berdasarkan pola inflasi dan kalender konsumsi masyarakat.
2. Memperluas jangkauan Kios Pangan Sukma melalui kemitraan dengan warung lokal atau BUMDes sebagai titik distribusi harga terjangkau.
3. Mengarahkan sebagian pembiayaan Program KURDA Sukma untuk sektor pangan strategis agar berdampak langsung terhadap stabilitas pasokan dan harga.
4. Memperkuat skema subsidi dan bantuan sosial pangan yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat rentan.

3. Kelancaran Distribusi (Distribution Smoothness)

1. Menjamin kelancaran distribusi bahan pokok melalui perbaikan infrastruktur jalan dan optimalisasi jalur distribusi alternatif, termasuk transportasi sungai.
2. Meningkatkan pengawasan distribusi untuk mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga, khususnya menjelang HBKN.

Memperkuat koordinasi dengan distributor dan pedagang besar untuk menjaga

3. kesinambungan pasokan dan stabilitas harga.

4. Komunikasi Efektif (Effective Communication)

1. Mengembangkan sistem pemantauan harga dan stok pangan berbasis digital dan real time sebagai dasar pengambilan keputusan TPID.
2. Meningkatkan integrasi data antar perangkat daerah terkait pangan, perdagangan, dan logistik.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan TPID melalui peningkatan koordinasi, analisis data inflasi, dan perencanaan intervensi berbasis risiko.
4. Menyampaikan informasi harga dan kebijakan pengendalian inflasi secara rutin kepada masyarakat melalui media lokal dan sarana publik.
5. Melakukan edukasi konsumsi pangan lokal dan belanja bijak untuk menekan ekspektasi inflasi.
6. Membangun forum komunikasi rutin antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai sarana deteksi dini permasalahan harga.